

RINGKASAN

**Vina Azhawa
210510192** **Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Studi Penelitian di Kota Lhokseumawe)**

(Dr Budi Bahreisy, S.H., M.H dan Dr Yusrizal, S.H., M.H)

Penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan persoalan kompleks yang membutuhkan pendekatan khusus. Kenakalan anak, khususnya tindak pidana pencurian, masih menjadi persoalan aktual di Indonesia dan semakin memprihatinkan ketika pelakunya adalah anak-anak. Penanganan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana tidak dapat dipersamakan dengan orang dewasa, melainkan harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dalam Pasal 1 angka 7 menegaskan mekanisme *diversi* sebagai pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke luar peradilan pidana demi kepentingan terbaik bagi anak.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum dilakukan oleh penyidik Polres Kota Lhokseumawe terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan serta untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan penyidik Polres Kota Lhokseumawe, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan dan peraturan perundang-undangan terkait.

Penegakan hukum terhadap anak di bawah umur pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kota Lhokseumawe telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Polres Kota Lhokseumawe menerapkan *restorative justice* melalui *diversi* sesuai Pasal 7 UU SPPA dengan melibatkan keluarga, masyarakat, dan lembaga terkait. Penelitian menemukan hambatan internal, kurangnya sinergi, keterbatasan SDM/fasilitas, kendala regulasi, dan eksternal, rendahnya pemahaman masyarakat, sikap anak tidak kooperatif, faktor lingkungan. Meski demikian, upaya preventif dan represif tetap dijalankan untuk menjamin kepastian hukum serta perlindungan anak.

Disarankan kepada aparat penegak hukum, khususnya di Polres Kota Lhokseumawe, untuk terus meningkatkan pelatihan dan pemahaman mengenai penanganan perkara anak agar sejalan dengan prinsip perlindungan anak dalam UU SPPA. Selain itu, peran keluarga dan masyarakat juga perlu diperkuat dalam mendukung penerapan keadilan restoratif melalui edukasi dan pembinaan anak.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Anak, Pencurian dengan Kekerasan.

SUMMARY

Vina Azhawa *Law Enforcement Against Children as Perpetrators of Violent*
210510192 *Theft (A Case Study in Lhokseumawe City)*

(Dr. Budi Bahreisy, S.H., M.H. and Dr. Yusrizal, S.H., M.H)

Law enforcement against children as perpetrators of theft with violence is a complex issue that requires a special approach. Juvenile delinquency, particularly theft, remains an actual problem in Indonesia and becomes increasingly concerning when the perpetrators are children. The handling of children in conflict with the law cannot be equated with that of adults, but must refer to Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, which in Article 1 point 7 emphasizes the diversion mechanism as the transfer of the settlement of children's cases from criminal justice proceedings to processes outside the criminal justice system in the best interests of the child.

The purpose of this study is to examine how law enforcement is carried out by the investigators of the Lhokseumawe Police against children who commit theft with violence, as well as to identify the obstacles encountered in its implementation.

This research employs an empirical juridical method with a qualitative approach. Primary data were obtained through interviews with investigators at the Lhokseumawe Police, while secondary data were gathered from literature studies and relevant legislation.

Law enforcement against minors as perpetrators of theft with violence in Lhokseumawe City has been carried out in accordance with the applicable legal provisions, namely Law No. 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System and Law No. 35 of 2014 on Child Protection. The Lhokseumawe Police implement restorative justice through diversion as stipulated in Article 7 of the Juvenile Criminal Justice System Law, involving families, communities, and related institutions. The study identified internal obstacles, including lack of synergy, limited human resources and facilities, and regulatory constraints, as well as external obstacles such as low public understanding of diversion, uncooperative behavior of children, and environmental factors. Nevertheless, both preventive and repressive measures are still undertaken to ensure legal certainty and the protection of children.

It is recommended that law enforcement officers, particularly at the Lhokseumawe Police, continuously enhance their training and understanding in handling juvenile cases to align with the principles of child protection under the Juvenile Criminal Justice System Law (UU SPPA). In addition, the role of families and communities should be strengthened in supporting the implementation of restorative justice through education and character development for children.

Keywords: *Law Enforcement, Child, Violent Theft.*